

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Nama Lembaga : Sekretariat KPU Kabupaten Malang
Tahun : 2015

NO.	KEGIATAN / OUT PUT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	001	Jumlah draft juknis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	100 %
		002	Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota	100 %
		003	Jumlah Kpu Provinsi dan Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100 %
		004	Prosentase KPU Provinsi, KPU Kab/kota yang laporan keuangannya sesuai SAP	100 %
		005	Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan	100 %
		006	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	100 %
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	001	Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satker	100%
		002	Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mampu melakukan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
		003	Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusian	100%

			logistik pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing satker	
		004	Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik sesuai SOP	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	001	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	100%
		002	Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	100%
		003	Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		004	Prosentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU	100%
		005	Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%
		006	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	100%
		007	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	100%
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)	001	Prosentase Pengajuan Berkas Persyaratan Administrasi Kepegawaian Yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (TMT)	100 %
		002	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.	100 %
		003	Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.	100 %
		004	Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU	100 %
		005	Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan	100 %
		006	Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi	100 %

		007	Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100 %
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)	001	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.	100 %
		002	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu.	100 %
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)	003	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100 %
		004	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan	100 %
		005	Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU.	100 %
		006	Jumlah KPU Provinsi yang telah menerapkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU.	100 %
		007	Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	100 %
		008	Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilikada yang bersifat permanen kepada lembaga	100 %
		009	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	100 %
		010	Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement.	100 %
		011	Persentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari.	100 %
		012	Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan	100 %

			KPU.	
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	001	Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara	100 %
		002	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		003	Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	100 %
		004	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	100 %
		005	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100 %
		006	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	100 %
7	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	001	Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	100 %
		002	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	100 %
		003	Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye	100 %
		004	Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum	100 %
		005	Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu	100 %
8	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan	001	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	100 %

Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)	002	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
	003	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	100 %
	004	Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran	100 %
	005	Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	100 %
	006	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100 %
	007	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada	100 %
	008	Jumlah pusat pendidikan pemilih	100 %
	009	%Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100 %

PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (076.01.01)	Rp.	1.474.308.000
2.	Program penguatan kelembagan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06)	Rp.	39.520.994.000
TOTAL		Rp.	40.995.302.000

Kepanjen, 10 Februari 2015

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**



ABDUL KODIR, S.sos, MM

Pembina

NIP. 197005251998031011